

TEMPO Interaktif, Timika: Presidium Dewan Papua (PDP) belum mengagendakan kegiatan pada hari kemerdekaan Papua Barat, 1 Desember 2003 mendatang. Karena peringatan itu adalah kerja kolektif dan tidak bisa ditentukan oleh satu atau dua orang saja. "Sampai sekarang kami belum tahu kegiatan apa yang akan dilaksanakan," kata Ketua PDP Tom Beanal ketika dihubungi *Tempo News Room di Timika Sabtu (29/11)*.

Menurut Tom, pemerintah Provinsi Papua telah menghalang-halangi masyarakat Papua untuk memperingati hari kemerdekaannya. Gubernur Papua, Kapolda Papua, dan pejabat teras di Provinsi Papua mengeluarkan maklumat larangan pengibaran bendera Bintang Kejora dan kegiatan berbau politik lainnya di seluruh tanah Papua pada 1 Desember 2003. Larangan itu dikeluarkan pertengahan November ini. "Menteri Dalam Negeri di Jakarta dan pemerintah pusat tidak melarang rakyat Papua memperingati hari kemerdekaannya, pemerintah di Papua malah melarang. Ini membingungkan kami rakyat Papua," katanya.

Tom menambahkan pihaknya belum sempat bertemu dengan pemerintah Provinsi Papua berkaitan dengan larangan tersebut karena untuk beberapa waktu Tom berada di Jakarta.

Tom menghimbau agar masyarakat Papua tetap tenang menjelang 1 Desember dan melakukan aktivitas masing-masing seperti biasa.

Pada kesempatan terpisah Kepala Polisi Resort Mimika, Ajun Komisaris Besar Polisi Paulus Waterpaw menegaskan polisi tidak akan memberikan izin kepada masyarakat melakukan kegiatan berbau politik di wilayah hukum Polres Mimika, 1 Desember mendatang. Namun katanya polisi hanya mengizinkan masyarakat melakukan kegiatan ibadah di tempat-tempat tertentu yang bukan di lokasi fasilitas umum. "Pembatasan ini untuk memberikan rasa aman kepada warga lain yang tidak terkait dengan peringatan 1 Desember. Saya harap masyarakat memaklumi hal ini" katanya.

Marselos Dou - Tempo News Room

